

BAB 11 KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

11.1 Kesimpulan

Permasalahan lingkungan ini dipandang sebagai sesuatu yang disebabkan oleh perilaku manusia yang maladaptif, oleh karena itu perlu dicarikan solusi sesuatu yang dapat menekan perilaku buruk manusia terhadap lingkungan yang bersumber dari *human behavior*. Upaya-upaya tersebut ditempuh melalui perbaikan perilaku prolingkungan (*proenvironmental behavior*). Namun sebelum mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk merehabilitasi perilaku prolingkungan, perlu diketahui terlebih dahulu apa sebenarnya yang ada di balik perilaku tersebut dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Pasar Minggu ini mencoba memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut sekaligus juga menguji apakah perilaku prolingkungan tersebut dilandasi oleh faktor ekonomi atau masyarakat sudah mulai menyadari pentingnya memiliki orientasi lingkungan. Disamping itu penelitian ini telah menjelajah aspek yang berkenaan dengan pelaksanaan penilaian kebersihan bangun praja yang dilakukan pemerintah pusat terhadap kota-kota yang ada di Indonesia sesuai dengan kategorinya. Penjelajahan ini dilakukan dengan tujuan apakah sebuah penghargaan Adipura benar-benar sesuai dengan perilaku prolingkungan masyarakatnya.

Adapun kesimpulan atau generalisasi yang ditulis pada bab ini bukan merupakan kesimpulan atau generalisasi untuk seluruh wilayah atau kota di Indonesia. Selain karena pengambilan sampel dilakukan di sekitar lokasi titik pantau Adipura di Jakarta Selatan saja, penulis tidak melakukan komparasi dengan kota-kota lain dalam wilayah Indonesia. Hal ini telah dijelaskan pada bab terdahulu tentang keterbatasan penelitian ini. Namun walau demikian, penulis telah mencoba memecah wilayah sampel penelitian menjadi 10 lokasi titik pantau di mana responden pada masing-masing lokasi titik pantau Adipura dianalisis secara sendiri-sendiri. Hasil korelasi variabel perilaku prolingkungan untuk masing-masing lokasi titik pantau Adipura ternyata tidak sama, seperti misalnya faktor-faktor yang berkorelasi dengan perilaku prolingkungan di titik pantau pasar

ternyata tidak sama dengan faktor-faktor perilaku prolingkungan di perumahan menengah.

Kesimpulan yang peneliti dapatkan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Satu-satunya faktor sosiodemografi yang berkorelasi dengan perilaku prolingkungan adalah variabel pekerjaan. Terdapat korelasi langsung dan signifikan antara "jenis pekerjaan" dengan "perilaku prolingkungan", dalam hal ini responden yang bekerja pada sektor informal dan swasta cenderung memiliki perilaku prolingkungan yang lebih baik, terutama sekali sektor informal. Kesimpulan ini hampir sama dengan penelitian di Eropa Timur yang menggambarkan bahwa struktur dasar *concern* lingkungan di Eropa Timur sama dengan pola yang muncul di Eropa Barat. Variabel orang-orang yang bekerja pada sektor non-produktif lebih mungkin untuk berorientasi pro lingkungan. Definisi sektor non produktif di Eropa tidak dimaksudkan sama dengan sektor informal di Indonesia, namun penganalogiannya dengan sektor informal lebih didasarkan bahwa kedua sektor tersebut bukan sektor formal atau sektor pemerintahan.

Variabel sosiodemografis yang lain seperti tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, usia, jenis kelamin, dan domisili sama sekali tidak berkorelasi dengan perilaku prolingkungan. Variabel-variabel tersebut hanya terkait dengan variabel lain yang berkorelasi dengan variabel perilaku prolingkungan, seperti motif, sikap, pengetahuan, dan orientasi lingkungan.

2. Terdapat korelasi langsung dan signifikan antara "sikap proteksi lingkungan" dengan "perilaku prolingkungan". Hubungan korelasi ditunjukkan oleh tanda positif yang artinya semakin baik "sikap proteksi" seseorang terhadap lingkungan maka akan semakin baik pula "perilaku prolingkungan". Konsep sikap yang berasal dari Cluck (1997) ini sebagai sebuah konsep tiga dimensi, dengan lebih memandang dunia, perhatian terhadap lingkungan, dan memiliki komitmen terhadap lingkungan akan berpengaruh positif terhadap perilaku seseorang terhadap lingkungan. Sikap seseorang ini dapat diaktivasi melalui "pendidikan dan pelatihan lingkungan", peningkatan "motif", serta memperhatikan informasi di tingkat masyarakat melalui papan "pengumuman

RT/RW". Dengan pelatihan lingkungan akan menambah wawasan seseorang, begitu juga informasi lingkungan yang banyak disajikan oleh media RT/RW ikut membentuk sikap seseorang. Dengan memiliki sikap proteksi lingkungan, seseorang akan lebih *concern* terhadap lingkungan dan memiliki komitmen yang baik dan memiliki cara pandang yang jelas terhadap lingkungan dan dunia.

3. Terdapat korelasi langsung yang signifikan antara "motif lingkungan" dengan "perilaku prolingkungan", ini artinya semakin tinggi motif seseorang terhadap lingkungan maka akan semakin baik pula perilaku prolingkungan. Korelasi ini sesuai dengan teori Schwartz (1977), bahwa norma moral lingkungan dapat diaktivasi melalui nilai-nilai sosioaltruistik dan juga nilai-nilai *biospheric* dan *egoistic* yang termasuk dalam "Environmental Motive Scale (EMS)", Seseorang yang memiliki motif lingkungan atas dasar kesehatan dirinya, lingkungan alamnya, serta memperhatikan umat manusia di bumi ini cenderung memiliki perilaku prolingkungan yang baik. Beberapa faktor pendukung lainnya dapat meningkatkan 'skala motif' tersebut antara lain melalui pendidikan yang baik, peningkatan pengetahuan serta banyak mendapat informasi lingkungan dari media massa seperti surat kabar, majalah, internet, radio, dan spanduk. Faktor gender dan usia cukup berpengaruh terhadap motif seseorang. Kaum perempuan cenderung memiliki motif lebih baik dibanding kaum laki-laki, dan demikian pula dengan orang berusia lebih muda akan memiliki motif lebih baik.
4. Terdapat hubungan antara "pengetahuan lingkungan" dengan "perilaku prolingkungan". Hubungan korelasi ditunjukkan oleh tanda positif yang artinya semakin baik "pengetahuan" seseorang terhadap lingkungan maka akan semakin baik pula "perilaku prolingkungan". Faktor pengetahuan (*knowledge*) memainkan peranan penting dalam memperkuat hubungan perilaku dan sikap lingkungan dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan pandangan dan argumen yang mendukung kepercayaan dan perilaku seseorang terhadap lingkungan. "Pengetahuan lingkungan" diaktivasi oleh "pendidikan", "pekerjaan", dan "pendapatan" yang baik. Pengetahuan

juga dapat ditingkatkan melalui informasi yang diperoleh dari media cetak dan elektronik seperti: surat kabar, majalah, brosur/pamflet, spanduk, dan internet.

5. Faktor lain yang mempengaruhi perilaku prolingkungan adalah "orientasi lingkungan", dalam artian semakin seseorang berorientasi lingkungan terhadap setiap tindakannya yang berkaitan dengan lingkungan hidup maka akan semakin baik pula lah perilakunya terhadap lingkungan.
6. Dari hasil uji hipotesis, orientasi perilaku prolingkungan masyarakat Jakarta Selatan lebih kepada lingkungan hidup dibanding orientasi ekonomi, dan dengan demikian disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara Alasan Ekonomi dengan Perilaku Prolingkungan di Jakarta Selatan. Ini bermakna lebih jauh kepada implikasi teoritis yang akan dijelaskan kemudian.
7. Penghargaan Adipura yang telah diraih oleh Jakarta Selatan selama 6 tahun berturut-turut telah dicerminkan oleh perilaku prolingkungan masyarakatnya. Walau belum memuaskan, skor perilaku masyarakat Jakarta Selatan masuk dalam kategori "Baik". Namun ini tidak menjustifikasikan bahwa sebuah kota yang telah bertahun-tahun mendapatkan penghargaan Adipura secara otomatis akan mendapatkan skor yang baik dalam hal perilaku prolingkungan.
Tidak terdapat korelasi perilaku prolingkungan apakah responden tinggal di perumahan menengah, perumahan sederhana, di sekitar stasiun atau lokasi lainnya yang merupakan titik pantau Adipura, tetapi perilaku prolingkungan untuk masing-masing lokasi titik pantau tersebut terlihat berbeda nyata antara lokasi pemenang penghijauan dengan lokasi lainnya, artinya perilaku prolingkungan masyarakat di lokasi yang ditetapkan sebagai pemenang penghijauan relatif lebih baik dibanding lokasi lainnya.
8. Tidak terdapat korelasi langsung yang signifikan antara "tingkat pendidikan" dengan "perilaku prolingkungan". Kesimpulan ini berbeda dengan hasil penelitian di Teheran (Iran) dan Eropa Timur. Di Teheran dikatakan bahwa "tingkat pendidikan" berkorelasi positif dengan "sikap" dan "perilaku" prolingkungan. Sedangkan di Eropa Timur disebutkan "tingkat pendidikan" yang lebih tinggi lah yang secara langsung mempengaruhi *concern* lingkungan.

Bila variabel "pendidikan" di Eropa Timur dan Teheran berkorelasi langsung terhadap "perilaku prolingkungan", maka di Jakarta Selatan dapat dikatakan variabel "pendidikan" berkorelasi tidak langsung dengan "perilaku prolingkungan", dalam artian variabel "pendidikan" dapat mengaktivasi "variabel pengetahuan" dan "motif lingkungan" untuk meningkatkan "perilaku prolingkungan".

9. Tidak terdapat korelasi langsung yang signifikan antara "tingkat pendapatan" dengan "perilaku prolingkungan". Kesimpulan ini berbeda dengan penelitian di Iran dan Eropa Timur. Di Eropa Timur disebutkan bahwa orang yang berpendapatan lebih tinggi lebih mungkin untuk berorientasi prolingkungan. Sedangkan di Iran disebutkan variabel "tingkat pendapatan" memiliki dampak signifikan terhadap "sikap" dan "perilaku lingkungan".

Bila variabel "pendapatan" di Eropa Timur dan Teheran berkorelasi langsung terhadap "perilaku prolingkungan", maka di Jakarta Selatan dapat dikatakan variabel "pendapatan" berkorelasi tidak langsung dengan "perilaku prolingkungan", dalam artian variabel "pendapatan" dapat mengaktivasi "pengetahuan lingkungan" untuk meningkatkan "perilaku prolingkungan".

10. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang dapat meramalkan perilaku prolingkungan seseorang, yaitu: "sikap proteksi lingkungan", "motif", dan "orientasi lingkungan". Rumus yang dapat digunakan untuk meramal perilaku tersebut adalah:

$$Y = 17,455 + 0.728 X_1 + 0.225 X_2 + 0.120 X_3, \text{ di mana:}$$

Y = Perilaku ProLingkungan

X₁ = Orientasi Lingkungan

X₂ = Sikap Proteksi Lingkungan

X₃ = Motif Lingkungan

Angka R square 0.197 mengartikan bahwa hanya 19.7% perilaku prolingkungan dapat dijelaskan oleh variabel sikap, motif, dan orientasi lingkungan. Sedangkan sisanya 80.3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain.

11. Media massa tidak berkorelasi langsung terhadap perilaku prolingkungan, namun perannya cukup penting dalam mengaktivasi variabel lain dalam meningkatkan perilaku prolingkungan.

12. Peran "pendidikan dan pelatihan" lingkungan hidup (diklat LH) belum cukup signifikan berkorelasi dengan perilaku prolingkungan, namun peran diklat LH cukup signifikan dalam membentuk sikap proteksi lingkungan.
13. Faktor sosiodemografi seperti umur muda dan jenis kelamin wanita berkorelasi positif dengan motif lingkungan, sedangkan status kepemilikan rumah berkorelasi dengan orientasi lingkungan seseorang.

11.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian memberikan implikasi teoritis sebagai berikut:

1. Hasil penelitian terhadap responden di Jakarta Selatan ini tidak setuju terhadap hipotesis *The Economic Contingency Hypothesis* yang menyatakan bahwa suatu usaha memperluas basis sosial dari kepedulian lingkungan tergantung pada kondisi ekonomi, di mana pada kondisi ekonomi yang buruk hubungan antara latar belakang sosial dengan kesadaran lingkungan sangat kuat. Pada kondisi tersebut masyarakat tidak lagi memperhatikan lingkungannya dan tidak memberikan dukungan bagi proteksi lingkungan dan lebih memprioritaskan pada tujuan ekonomi mereka sehari-hari. Terbukti bahwa perilaku prolingkungan masyarakat Jakarta Selatan lebih berlandaskan pada orientasi lingkungan.
2. Sebagaimana dikatakan oleh Jonas dan Dunlap tentang *the Broadening Base Hypothesis* bahwa seiring berjalannya waktu, perbedaan struktur dalam masyarakat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran lingkungan. Terbukti bahwa penelitian di Jakarta Selatan ini, tingkat pendidikan, pendapatan, gender, dan suku bangsa tidak berpengaruh terhadap perilaku prolingkungan. Dengan demikian teori tentang lapisan sosial tidak berlaku untuk menjelaskan perilaku prolingkungan di Jakarta Selatan. Kesimpulan ini hanya berlaku untuk wilayah Jakarta Selatan saja mengingat teknik pengambilan sampel lebih mempertimbangkan kriteria sebuah penghargaan Adipura.
3. Hasil korelasi antara variabel-variabel terhadap variabel perilaku prolingkungan menggambarkan tidak terdapat korelasi langsung antara tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan terhadap perilaku prolingkungan. Bahwa semakin kaya seseorang dan semakin tinggi pendidikannya tidak memiliki

hubungan positif terhadap perilaku prolingkungan. Orang kaya mengendarai mobil pribadi dengan alasan kenyamanan, efisiensi waktu, dan alasan kesehatan untuk dirinya. Sementara emisi yang dikeluarkan justru dirasakan orang-orang miskin. Namun perilaku berkendara (*transportation behavior*) masyarakat berpendapatan tinggi dengan mengendarai mobil pribadi tidak dapat disalahkan seluruhnya, karena belum tersedianya moda transportasi yang nyaman dan aman bagi semua orang. Selain itu dijelaskan di sini bahwa perilaku prolingkungan masyarakat yang tinggal di perumahan menengah/mewah yang diukur dalam penelitian ini tidak lebih baik dibanding masyarakat kelas bawah, bahkan perilaku masyarakat orang yang berpendapatan lebih tinggi tersebut cenderung di bawah rata-rata masyarakat lain. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Giddens bahwa modernitas mengurangi risiko menyeluruh bidang dan gaya hidup tertentu, tapi pada waktu bersamaan memperkenalkan parameter risiko baru yang sebagian besar atau seluruhnya tidak dikenal di era sebelumnya (Giddens, 1991: 3-4 dalam Ritzer 2007). Ini pula yang memberi resiko lebih besar terhadap ekologi sebagaimana disebut oleh Barry seperti: ditemukan pemanasan global, kehilangan keanekaragamanhayati, penipisan lapisan ozon, dan kerusakan ekosistem.

4. Teori dasar nilai *concern* lingkungan dari Stern dan Dietz (1994) yang mengembangkan teori Schwartz (1997) tentang model norma aktivasi, bahwa norma moral lingkungan dapat diaktivasi melalui nilai-nilai sosialtruistik, biosperik, dan egoistik masih bisa diterapkan untuk mengaktivasi *concern* lingkungan masyarakat Jakarta Selatan. Aktivasi tersebut dapat dilakukan pada masyarakat umur muda, masyarakat yang sedang menempuh pendidikan, meningkatkan perhatian pada kaum wanita, dan lebih gencar menyampaikan pesan-pesan lingkungan melalui media cetak dan elektronik.
5. Menurut Mc Farlane dan Boxall, pengetahuan (*knowledge*) memainkan peranan penting dalam memperkuat hubungan perilaku dan sikap lingkungan. Hasil penelitian ini memperkuat pendapat Farlane dan Boxall bahwa pengetahuan merupakan variabel yang berkorelasi dengan perilaku prolingkungan. Sedangkan variabel yang mengaktivasi pengetahuan

lingkungan adalah tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan peran media cetak dan elektronik.

6. Peran negara sangat berperan dalam membentuk habitus seperti yang dikatakan Bourdieu. Ini terlihat dari program Adipura yang selama bertahun-tahun ikut membentuk perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Walaupun setengah dipaksakan oleh instruksi dari tingkat atas, warga mentaatinya melalui peran ketua RT/RW yang dibantu oleh kader lingkungan dan juru pemantau jentik (jumantik) yang tugasnya terkait dengan lingkungan hidup. Sebagai perbandingan, peran negara juga menentukan keberhasilan program lingkungan hidup yang dilakukan di Curitiba (Brazil, yang notabene dijadikan percontohan pengelolaan kebersihan kota oleh banyak kota besar di dunia), Minamata (Jepang), dan Taipei (Taiwan). Di ketiga kota tersebut tampak peran negara dibantu oleh partisipasi masyarakat untuk keberhasilan program kebersihan lingkungan.

Untuk mengaktifkan gerakan sosial masyarakat untuk berperilaku yang baik di terhadap lingkungan di Jakarta Selatan diperlukan seorang tokoh yang dapat menggerakkan masyarakat untuk bertindak. Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan lapangan, habitus dan lingkungan (*field*) bukan hanya dibentuk oleh peran negara semata, tetapi juga diperlukan adanya kepemimpinan guna menggerakkan sebuah gerakan sosial untuk membentuk suatu habitus baru.

7. Sikap lingkungan terbentuk sebagai sebuah indikator dan komponen perilaku prolingkungan. Sikap proteksi lingkungan adalah sebuah konsep tiga dimensi meliputi *environmental worldview*, *environmental concern*, dan *environmental commitment*. (Cluck, 1997). Sikap proteksi lingkungan dalam penelitian ini mempengaruhi perilaku prolingkungan, dengan demikian penelitian ini membuktikan pendapat Cluck.

Beberapa faktor dapat mengaktivasi sikap proteksi lingkungan, yaitu: motif lingkungan (nilai-nilai egoistik, biosferik, dan altruistik), pernah mengikuti diklat lingkungan hidup, dan peran papan pengumuman RT/RW sebagai pemberi pesan lingkungan.

11.3 Implikasi Kebijakan

Sebagaimana telah disimpulkan pada bab kesimpulan bahwa variabel pengetahuan, motif, sikap, berkorelasi langsung terhadap perilaku prolingkungan. Selain itu masih banyak variabel lain yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dan saling terkait, sehingga tidak ada satu variabel pun yang dominan mempengaruhi perilaku prolingkungan.

Melalui laporan ini peneliti mencoba memberikan beberapa saran rekomendasi guna peningkatan perilaku prolingkungan masyarakat khususnya diperkotaan. Perilaku prolingkungan memiliki 4 (empat) pilar, yaitu: penanganan sampah, konsumsi yang bertanggung jawab, konservasi energi, dan perilaku transportasi. Dengan demikian implikasi kebijakan yang menyangkut upaya peningkatan perilaku prolingkungan dilakukan dengan memperhatikan keempat pilar tersebut.

Terhadap pemerintah peneliti meyarankan:

- 1) Diperlukan mekanisme kebijakan pemerintah agar masyarakat bisa setiap hari berperilaku prolingkungan, dan tidak tergantung dengan penghargaan Adipura. Agar pemerintah segera mengatur aturan turunan dari Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah, sebab sampai saat ini peraturan tindak lanjut dari undang-undang tersebut belum terbit. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Turunan undang-undang tersebut dirasa mendesak karena aparat pemerintah terasa sulit untuk menemukan payung hukum dalam menegakkan aturan kebersihan. Di sisi lain perilaku warga tanpa ada aturan hukum yang tegas akan semakin tidak terkendali sehingga program kebersihan lingkungan tidak akan tercapai, dan warga tidak akan pernah menjalani "kebiasaan sosial" dengan adanya *punishment* bila peraturan tentang sampah tidak dijalankan. Peran negara dan partisipasi warga menjadi penting bila melihat contoh keberhasilan pengelolaan perkotaan, kebersihan, dan lingkungan yang dilakukan di Minamata, Curitiba, ataupun Taipei.
- 2) Mensosialisasikan Program 3 R (*Reuse, Recycle, dan Reduce*) kepada masyarakat luas tidak hanya dalam hal penanaman pengertian dan pemahaman

saja, tapi lebih kepada tindakan nyata dan pendampingan yang terus menerus sehingga program tersebut dijamin kontinuitasnya. Pemerintah harus memperbaiki sistem penanganan sampah sehingga tidak menimbulkan sikap apatisme masyarakat dalam membuang sampah, dan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan masing-masing melalui pendekatan budaya. Kemudian melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga dapat memunculkan beberapa tokoh terdepan dalam pelaksanaan program 3R khususnya kepada ibu-ibu rumah tangga dan warga berumur muda karena terbukti kaum wanita dan warga berumur muda lebih *concern* terhadap lingkungan.

- 3) Terkait dengan *transportation behavior*, pemerintah hendaknya menyempurnakan moda transportasi yang gampang dicapai, terintegrasi, nyaman dan nyaman dimanfaatkan oleh semua kalangan. Tujuan dari penyempurnaan moda transportasi ini adalah agar warga lebih memilih menggunakan kendaraan umum dari pada kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan sekaligus mengurangi emisi kendaraan yang akan mengakumulasi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Selain itu mengerahkan institusi penelitian untuk memikirkan energi alternatif yang murah dan terjangkau oleh lapisan masyarakat kelas bawah guna mengurangi emisi karbon.
- 4) Terkait dengan *energy conservation* pemerintah hendaknya terus menerus mengkampanyekan tentang pentingnya hemat energi dan hemat penggunaan air melalui media elektronik dan internet, media cetak, spanduk, serta media RT/RW. Karena terbukti informasi lingkungan yang disampaikan melalui media tersebut ikut mengaktivasi pengetahuan lingkungan, motif lingkungan, sikap, dan orientasi lingkungan serta perilaku prolingkungan itu sendiri.. Selain itu pemerintah hendaknya mengimbau kepada dunia otomotif agar menggalakkan penanaman pohon, minimal di pekarangan, dari setiap liter bensin yang mereka gunakan.
- 5) Mengaktifkan program penghijauan di perkotaan basis masyarakat melalui RT/RW setempat dengan melibatkan pengusaha setempat, serta memfasilitasi aktivitas warga yang terkait dengan kecintaan terhadap makhluk makhluk

hidup. Hal ini akan meningkatkan nilai orientasi *biosferik* dan *altruistik* dalam diri warga masyarakat, dan nilai orientasi tersebut akan meningkatkan motif lingkungan yang pada akhirnya akan mengaktivasi perilaku prolingkungan.

- 6) Terkait dengan *responsible consumption*, pemerintah diharapkan lebih memfasilitasi keberadaan pasar tradisional yang bersih untuk menyeimbangkan keberadaan pasar swalayan, mal, dan sebagainya yang terbukti menggunakan energi listrik sangat besar serta banyak menggunakan bahan kemasan plastik yang berakibat buruk terhadap lingkungan. Pemerintah pun hendaknya mengkampanyekan kepada masyarakat luas agar lebih memilih berbelanja ke pasar tradisional dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Ini dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan (*non renewable resources*). Selain itu mengkampanyekan pengurangan penggunaan bahan plastik yang sulit dihancurkan oleh tanah, serta mengkampanyekan penggunaan bahan *refill* yang aman.
- 7) Memperbaiki kurikulum sekolah yang memberikan kontribusi pengetahuan lingkungan yang lebih besar sejak sekolah dasar serta memperbanyak kegiatan yang menanamkan kecintaan anak-anak kepada lingkungan, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Faktor pendidikan terbukti dapat mengaktivasi motif lingkungan (*biosferik* dan *altruistik*) dan pengetahuan lingkungan yang bermuara pada peningkatan perilaku prolingkungan.
- 8) Memberikan bukti nyata kepada masyarakat bahwa setiap pajak yang dikenakan kepada masyarakat benar-benar digunakan untuk kegiatan pembangunan yang bernuansakan lingkungan. Hal ini ditujukan guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya dalam hal retribusi sampah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan menumbuhkan sikap proteksi lingkungan yang akan meningkatkan perilaku prolingkungan.
- 9) Khusus bagi penilaian Adipura yang dilaksanakan pemerintah pusat agar memasukkan skor indikator perilaku prolingkungan masyarakat ke dalam penilaian Adipura secara keseluruhan. Penilaian kegiatan Adipura pun hendaknya tidak terbatas pada kegiatan fisik semata tetapi juga melihat

aktivitas warga yang bukan berasal komando atau instruksi dari aparat pemerintah. Selama ini kegiatan bersih-bersih yang dilakukan pada prasarana kota kerap sekadar mengisi acara atau keinginan pemerintah kota setempat untuk meraih Adipura.

- 10) Membina kelompok-kelompok masyarakat yang mencintai tanaman dan hewan karena terbukti masyarakat yang cinta terhadap makhluk hidup adalah masyarakat yang memiliki "*environment motive scale*" yang baik dan akan meningkatkan dan mempengaruhi perilaku prolingkungan. Dalam penelitian ini suku Jawa, Sunda, dan Banten memiliki motif biosfer yang baik dibanding suku-suku lainnya di Jakarta Selatan, dalam artian mereka lebih mencintai tumbuh-tumbuhan dan hewan.
- 11) Tidak segan-segan meniru seperti yang dilakukan pemerintah kota Minamata, Curitiba, dan Taipei dalam penanganan sampah dan kebersihan. Di Minamata pemerintah memasang standar tinggi terhadap kebersihan dan bersama masyarakat dalam rangka membentuk habitus dan membuat konsensus memilah sampah menjadi 22 jenis. Di Curitiba walikota merancang filosofi sederhana: inovasi bersama penduduk, merancang bersahabat dengan alam, dan memanfaatkan teknologi tepatguna. Warga yang mengumpulkan sampah diberikan kupon bis umum atau kupon makanan. Di Taipei dalam rangka *law enforcement*, pemerintah kota memperbanyak petugas pengawas sampah yang gajinya lebih tinggi dari petugas lainnya. Pemerintah juga meminta warga untuk memilah sampah sejak dari rumah agar mudah diangkut.

b. Meyarankan kepada dunia usaha:

- 1) Agar lebih proaktif dalam memberikan perhatian mereka kepada lingkungan melalui kegiatan-kegiatan sosial, sehingga masyarakat akan menjadi semakin sadar lingkungan.
- 2) Memproduksi bahan kemasan yang gampang dihancurkan oleh tanah serta lebih banyak memproduksi bahan isi ulang guna mengurangi produksi sampah.
- 3) Bekerjasama dengan pemerintah sehingga dapat memproduksi otomotif yang hemat energi.

- 4) Mengintegrasikan usaha yang dijalankan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan.

c. Kepada dunia perguruan tinggi:

- 1) Agar mengedepankan pentingnya pendidikan lingkungan bagi mahasiswa, tidak hanya secara teoritis belaka, melainkan juga perilaku staf pengajar, karyawan dan mahasiswa. Sebab tujuan besar dari pendidikan bukanlah pengetahuan, tetapi adalah aksi.
- 2) Mengkampanyekan aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup di sekitar kampus dalam aksi yang nyata.
- 3) Memasukkan materi pengetahuan lingkungan dalam mata kuliah dasar umum secara lebih luas.

d. Kepada masyarakat umum:

- 1) Agar lebih sadar kepada lingkungan dan berfikir bahwa apa yang ada di bumi hanya untuk generasi saat ini, tapi juga memikirkan generasi mendatang.
- 2) Mengintegrasikan perilaku sehari-hari yang bernuansa lingkungan, seperti menggunakan kembali barang bekas pakai, mengolah barang tak berguna menjadi barang ekonomis, membeli lebih banyak bahan isi ulang, menghemat listrik, air, tidak membuang sampah di area public, memungut sampah yang bukan kita hasilkan sendiri, serta sedapat mungkin menggunakan kendaraan umum ketimbang mobil pribadi.

e. Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM):

- 1) Agar benar-benar mendampingi masyarakat dalam peningkatan perilaku prolingkungan. Dalam hal ini LSM dapat berperan terlebih dahulu dalam aktivitas peningkatan pengetahuan, karena variabel pengetahuan berkorelasi dengan perilaku prolingkungan di Jakarta Selatan. Selain itu aktif mengkampanyekan program kebersihan melalui majalah dan spanduk yang berkorelasi langsung dengan perilaku prolingkungan.
- 2) Aktif memberi contoh langsung bagaimana sebenarnya pengolahan sampah yang benar dalam program 3R, karena 3R ini benar-benar merupakan indikator yang sangat berperan dalam membentuk perilaku prolingkungan.
- 3) Menyuarakan tentang pentingnya hemat energi dan sumberdaya air dalam artian sebenarnya kepada pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.